

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 1 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Drs.SINOENG NOEGROHO RACHMADI, M.M.
2. Jabatan : KEPALA BIRO - HUMAS - SEKRETARIAT DAERAH
3. NHK : 224525
4. Tanggal Pelaporan : 1 Nopember 2014, 16 Maret 2015

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 180 m2 & 80 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

1 Nopember 2014		16 Maret 2015	
Rp.	162.500.000	Rp.	117.140.000
Rp.	162.500.000	Rp.	117.140.000

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

1. Mobil, merk TOYOTA AVANZA, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

Rp.	160.000.000	Rp.	150.000.000
Rp.	160.000.000	Rp.	150.000.000

1 Nopember 2014

16 Maret 2015

**b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

**c. HARTA BERGERAK
LAINNYA**

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

C. SURAT BERTERIMA

**D. GIRO DAN SETARA KAS
LAINNYA**

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)

E. PIUTANG

TOTAL HARTA (II)

III. HUTANG

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN
(II - III)**

	1 Nopember 2014	16 Maret 2015
	----	----
	Rp. 20.000.000	Rp. 8.500.000
	Rp. 20.000.000	Rp. 8.500.000
	Rp. 0	Rp. 0
	Rp. 250.000.000	Rp. 245.000.000
	Rp. 250.000.000	Rp. 245.000.000
	Rp. 0	Rp. 0
	Rp. 592.500.000	Rp. 520.640.000
	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	Rp. 292.500.000	Rp. 220.640.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

